JURNAL ILMIAH MANAJEMEN, EKONOMI BISNIS, KEWIRAUSAHAAN
Halaman Jurnal: https://univ45sby.ac.id/ejournal/index.php/ekonomika
Halaman UTAMA Jurnal : https://univ45sby.ac.id/ejournal/index.php

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Pemerintah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas

Nanda Yoga Aditiya [1*], Popy Dian Indira Kusuma [2]
[1,2] Universitas Jendral Soedirman, Indonesia
Email : nanda.aditiya@mhs.unsoed.ac.id [1], poppy.kusuma@unsoed.ac.id [2]*

Abstract, *In creating accurate information, the Ministry of Home Affairs launched an application, namely the Regional Government Information System (SIPD), which is contained in Minister of Home Affairs Regulation Number 70 of 2019, this application is useful for achieving or measuring success in coordinating between the Central Government and Regional Governments. synergize with each other in creating accurate and accountable information. This research aims to determine the extent to which the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) application in the Sumbang District Government, Banyumas Regency can be used properly. This research uses qualitative research methods with data collection techniques carried out using interview, observation and documentation methods. The object of this research is Regional Government. This research uses Edward III's theory in the form of Communication, Human Resources (HR), disposition and bureaucratic structure. This theory is used to see the obstacles experienced in implementing the Regional Government Information System (SIPD) application. The results of the analysis of the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) in the Sumbang District Government, Banyumas Regency, of the four indicators in Edward III's theory are running in accordance with existing regulations and are significant. The obstacles that occur are influenced by applications that often experience problems with errors and system traffic. The benefit of the regional government information system (SIPD) application is that the regional financial planning process is easier to carry out because it is in an electronic system. Uniforming regional financial planning and governance processes, optimizing main activities and facilitating supervision and audits.*

Keywords: *Implementation, SIPD, Regional Government, Sumbang sub-district*

Abstrak, Dalam menciptakan sebuah informasi yang akurat Kementrian Dalam Negeri meluncurkan sebuah aplikasi yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, aplikasi ini berguna untuk mencapai atau mengukur suatu keberhasilan untuk berkoordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang saling bersinergi dalam menciptakan informasi yang akurat dan dapat dipertangung jawabkan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Pemerintah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dapat digunakan dengan baik. Penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Objek dalam penelitian ini Pemerintah Daerah. Peneliatian ini menggunakan teori Edward III berupa Komunikasi, Sumber Daya Manusia (SDM), disposisi dan struktur birokasi. Teori ini digunakan untuk melihat kendala yang di alami dalam implementasi aplikasi Sitem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Hasil dari analisis implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Pemerintah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dari ke empat indikator dalam teori edward III sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada dan signifikan. Hambatan yang terjadi sendiri dipengaruhi oleh aplikasi yang sering mengalami kendala eror dan trafic sistem. Manfaat adanaya aplikasi sistem Informasi Pemerintah daerah (SIPD) proses perencanaan keuangan Daerah lebih mudah dilakukan karena dalam sitem elektronik. Penyeragaman proses perencanaan dan tata kelola keungan Daerah, pengoptimalan dalam kegiatan utama dan mempermudah dalam pengawasan dan audit.

Kata kunci : Implementasi, SIPD, Pemerintah Daerah, Perencanaan Pembangunan

1. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman digital saat ini mendorong Kementrian Dalam Negeri dan pemerintah pusat secara umum untuk berinovasi dalam memanfaatkan kemajuan teknologi digital. teknologi informasi menjadi sangat penting dalam konteks perkembangan saat ini.

Received: November 20, 2024; Revised: Desember 03, 2024; Accepted: Desember 24, 2024; Published: Desember 30, 2024

Dalam era modernisasi ini, pengguna teknologi tidak dapat dihindari terutama dama era 5.0. Pada dasaranya pemerintah daerah dipimpin oleh Bupati atau Walikota dan dalam pekerjaannya dibantu oleh sekretaris daerah dan jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dalam pekerjaan membidangi hal hal tertentu. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal (391) ayat (1) tentang pemerintahan daerah bahwa "pemerintah daerah wajib menyediakan informasi yang meliputi informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah".

Beberapa tanggung jawab pemerintah daerah yang perlu diperhatikan termasuk menyusun rancangan peraturan daerah atau yang sering disingkat perda, menetapkan perda yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seta Mengajukan rancangan perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selain itu mereka juga membahas rancangan Perda tentang APBD Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memastikan pelaksanaan kewajiban daerah terlaksana dengan baik.

E-Government ataupun *Eelctronic Government* adalah wujud upaya dari pengembangan pelaksanaan pemerintahan yang berbasis teknologi elektronik yang berguna untuk memberikan suatu informasi serta pelayanan kepada masyarakat, dan juga urusan-urusan lain berhubungan dengan Pemerintahan, (Tumija, Dkk 2023). Pelaksanaan di wilayah Kabupaten Banyumas dalam tupoksinya akan di bantu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (DINKOMINFO), terakit semua kegiatan yang berkaitan dengan jaringan dan teknologi akan berakhir di instansi tersebut.

Dengan diterbitkannya Permendagri No. 77 Tahun 2020 yang secara otomatis menggantikan Permendagri sebelumnya yakni Permendagri No. 13 Tahun 2006 mengenai pedoman pengelolaan keuangan Daerah. Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Banyumas, tidak lagi menggunakan satu aplikasi tungal yang disebut satria keuangan. mereka juga mengunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dimana data darimkedua aplikasi tersebut terintegrasi untuk mendukung praktik tata kelola yang efektif.

Salah satu faktor yang meningkatkan efiseinsi penginputan perencanan dan keuangan oleh Pemerintah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas adalah adopsi aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Hal ini terjadi seiring dengan diberlakukannya Permendagri No 77 tahun 2020 dan tahun 2020 ditetapkan sebagai tahun awal penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Kabupaten Banyumas. Pada tahap awal

sosialisasi dan implementasi aplikasi tersebut banyak orang yang mengalami ketidaknyamanan karena aplikasi tersebut berbasis online. Hal ini di sebabkan karena Daya Manusia yang menjabat sebagai pejabat di Instansi tersebut cenderung kurang terupdate kemajuan teknologi.

Dengan melihat kondisi pada saat tahun 2021 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah tahun pertama dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 yang mengamanatkan bahwa harus satu aplikasi saja yang beroperasi pada bidang subbagian program dan keuangan Penerapan aplikasi berbentuk web ini bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik pemerintah khususnya di Kecamatan Sumbang, namun dalam menjalankan program ini tidak lah mudah harus memerlukan kerjasama dan kerja keras dari setiap instansi yang terlibat.

Setelah melakukan pengawamatan awal, penulis menemukan beberapa permasalahan. Sebelmunya Pemerintah Kecamatan Sumbang. masih mengunakan aplikasi SATRIA KEUANGAN tanpa kendala dalam pengunaannya. Namun pada awal tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan kewajiban yang mewajibkan seluruh OPD untuk beralih ke aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Karena aplikasi tersebut masih dalam tahap uji coba, beberapa OPD khususnya pada Kecamatan Sumbang menghadapi beberapa kendala. Hal ini disebabkan oleh banyaknya menu yang harus diisi dalam penginputan di Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) . seringkali para pegawai melewatkan beberapa proses penginputan. Dampaknya laporan yang dihasilkan menjadi tidak konsisten, pergeseran anggaran tertunda , sistem penggajian terlambat, dan jaringan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sering mengalami eror, mengakibatkan penundaan dalam penyusunan anggran kas, pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Pertanggung jawaban (SPJ), Pembuatan Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM).

Untuk memahami bagaimanan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di terapkan, penelitian ini menggunakan model implementasi. Menurut George Edward III (1980), implementasi merujuk pada tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam pandangan Edwards III (1980), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasi (*communications*), sumberdaya (*resources*), disposisi (*dispositions*); dan struktur Birokrasi (*bureaucratic structure*), (Tumija, Dkk. 2023). Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang "Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Pemerintah

Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas melalui teori Implementasi Kebijakan George Edward III, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi".

2. TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 menyebutkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Pasal 2 peraturan peremndagri Nomor 70 Tahun 2019 menyebutkan ruang lingkup SIPD diantaranya Informasi Pembangunan Daerah, Informasi Keuangan Daerah dan Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dibuat oleh Kemendagri yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses penataan dokumen rencana daerah sesuai dengan persyaratan hukum di indonesia. Badan Pengawas keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertangunh jawab atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), telah mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah No 60 tahun 2008, untuk meningkatkan kualitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dengan mematuhi peraturan perundang-undangan serta mengimplementasikan aplikasi pengelolaan Perencanaan serta Anggaran yang didasarkan pada peraturan menteri dalam negeri Nomor 70 Tahun 2019. Untuk memenuhi prinsip keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin warga negara untuk mengakses informasi publik adalah syarat minimal yang harus dipenuhi dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Tujuan pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah untuk memastikan bahwa Pengelolaan Informasi Daerah secara dapat dilakukan secara professional, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengharuskan Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi Pemerintahan Daerah, dan juga memiliki kewenangan untuk menyediakan dan mengelola Pemerintahan Daerah lainnya, Alfani, (Nasution, 2022).

Pasal 2 Permendagri No 70 tahun 2019 menguraikan bidang yang dicakup oleh Sistem Informasi Pemerintah daerah (SIPD), mencangkup informasi Pembangunan Daerah, Informasi Keuangan Daerah dan Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya. Dalam praktiknya pemerintah

daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi ke public dalam bentuk Informasi Pembangunan Daerah, Informasi Keuangan Daerah.

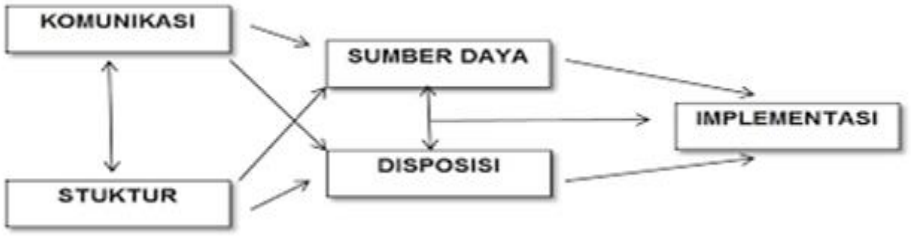


Gambar 1 Tampilan Awal Sistem Informasi Pemerintah daerah (SIPD)

Sumber : https://sipd.kemendagri.go.id/ diakses tanggal 24 September 2023

Teori Edward III

Berdasarakan kajian penelitian, penelitian ini mengadopsi teori Edward III untuk melakukan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Teori ini tujuan untuk menilai seberapa efektif Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dapat berjalan di suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), teori ini telah digunakan dalam beberapa penelitian untuk mengevaluasi implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di berbagai konteks. Terdapat 4 (empat) indikator dalam implementasi Sistem Informasi pemerintah daerah (SIPD) antara lain Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokasi .



Gambar 2 Teori Edward III

Sumber : diakses *google* (2023)

Beberapa peneliti yang melakukan penelitian terkait Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) diantaranya (Muhamad, & Narwani, 2021), Analis penerapan sistem informasi Daerah (SIPD) Pada Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. (Laudy, & Najamudin, 2020), Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat, (Nadya, Dkk, 2021),

Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Dinas Trasmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat, (Tumija, & Marja, 2023), Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. (Dela, & Juliana, 2022), Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

Melalui proses tersebut, karyawan diberikan pelatihan dan pengembangan yang relevan dengan kinerja pekerjaannya, sehingga diharapkan dapat menjalankan tanggung jawab pekerjaannya dengan sebaik - baiknya. (Abdul Aziz Sholeh et.al. 2024 :82)

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dalam kerangka penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang digunakan terbagi menjadi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam mengunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), informan yang diwawancarai meliputi, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala Sub, Bendahara dan Operator Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Sedangkan Data skunder merupakan dokumen terkait Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang berupa peraturan peraturan Pemerintah Pusat maupun pemerintah Daerah. Dalam pengambilan data menggunakan metode *perposive sampling* yaitu orang yang telah memahami dan terbiasa dengan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPD) sebagai informan dalam pengumpulan data primer.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Sumbang merupakan salah satu dari 27 kecamatan yang berada di Kabupaten Banyumas, memiliki luas wilayah 53.42 Km^2 , dengan jumlah penduduk 97.756 jiwa. Jumlah desa yang berada di Kecamatan Sumbang terdiri dari 19 desa. Kecamatan Sumbang dipimpin oleh Camat yang dibantu oleh sekretaris kecamatan, kasi pemerintahan, kasi pemberdayaan masyarakat, kasi pelayanan, kasi keamanan dan ketertiban, kasi ekonomi pembangunan, kasubag perencanaan dan keuangan, kasubag umum dan kepegawaian, dan dibantu oleh jajaran staf PNS dan non PNS.

Dalam peneliti ini menggunakan teori Edward III dalam menjawab permasalahan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada pemerintah Kecamatan

Sumbang Kabupaten Banyumas, terdapat 4 (empat) dimensi yang dapat menentukan suatu keberhasilan yang di kemukakan oleh Edward III terdiri atas Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

Komunikasi

Pada Kecamatan Sumbang implementaso penggunaan Sistem Informasi pemerintah Daerah (SIPD) telah disosialisasikan oelh Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, sosialisasi ini bertujuan agar pengoprasian dan penggunaan aplikasi berjalan dengan lancar tanpa hambatan dalam penginputan. Setiap kali melakukan penginputan, baik Rencana Kegiatan Anggran (RKA) induk maupun perubahan, Kepala Badan Keuangan dan Aset daerah (BKAD) memberikasn sosialisasi dan berkomunikasi kepada instansi di bawahannya, karena Kecamatan Sumbang merupakan bagian dari instansi dibawah naungan dinas terkait.

Dalam pengamatan awal penelitian, peneliti mengangap tidak ada hambatan dalam melakukan penginputan aplikasi Sistem Informasi pemerintah Daerah (SIPD), berdasarkan adanaya komunikasi anatara pemerintah Kecamatan Sumbang dan Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab terhadap Sistem Informasi pemerintah Daerah (SIPD). Setiap OPD memiliki pendamping untuk proses penginputan aplikasi, yang mempermudah koordinasi dan pelaksanaan penginputan. Di Kecamatan Sumbang terdapat satu operator yang bertanggung jawab penuh dalam penginputan data ke apliasi Sistem Informasi pemerintah Daerah (SIPD). Berdasarkan penelitian komunikasi yang baik dengan pimpinan dan OPD pendamping tidak menghambat operator dalam melakukan penginputan. Informasi yang diperoleh menunjukan bahwa penginputan telah sesuai dengan arahan dan komunikasi dengan besaran pagu yang telah di tetapkan. Hasil wawancara dengan narasumber menunjukan bahwa komunikasi sering terjadi dengan Badan Keuangan dan Aset daerah (BKAD) serta Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, “ ……Ya saya sering melakukan komunikasi……..”

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari (Nadya Balqis,Dkk, 2021), Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Dinas Trasmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat. komunikasi yang terjalin antara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja sudah terjalin dengan baik dalam penggunaan aplikasi SIPD ini. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian (Tumija, A dan Marja, S, 2023), Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang

Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan hasil analisis, pada BPKAD Kota Semarang sudah berjalan dengan baik.

***Sumber* Daya**

Sumber Daya terutama Sumber Daya Manusia (SDM), memiliki peran krusial dalam menerapkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), gagalnya implementasi sering kali disebabkan oleh faktor SDM. Pada wal penelitian peneliti mencurigai adanaya hambatan dalam menerapkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Pemerintah Kecamatan Sumbang dimana pegawi yang bertugas sebagai operator aplikasi mungkin mengalami kesulitan memhami informasi dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Menurut hasil riset yang dilakukan peneliti, di Pemerintah Kecamatan Sumbang sumber daya yang diberi hak akses atau dipercayai untuk melakukan penginputan memiliki kualitas sumber daya yang mendukung dan handal dalam menjalankan penginputan di apliasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Dari segi teknologi, sumber daya tersebut memiliki pemehaman tentang komputerisasi dan berbagi aplikasi yang digunakan sehingga tidak mengalami hambatan dalam menggunakan aplikasi tersebut. Meskipun tidak memiliki latar belakang pendidikan bidang akuntansi mereka mampu mengikuti dan memahami aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Sarana dan prasarana di Kecamatan Sumbang, Kabupaten banyumas, dinilai sudah memadai dengan koneksi internet yang lancar, tersedianya telepon, laptop, komputer dan printer. Hal ini membuat pelaksanaan kegiatan tidak mengalami kendala dalam hal sarana dan prasarana. Kasubag perencanaan dan keuangan menyatakan bahwa implementasi apliasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Sangat membantu dalam tugas mereka. Namaun masih ada sedikit hambatan dalam proses penginputan, dimana waktu yang tersedia terbatas dan harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Wawancara yang dilakukan dengan narasumber menjelaskan bahwa sumber daya yang berada pada Pemerintah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas sudah sesuai dimana Kasubag Perencanaan dan Keuangan sesuai degan latar belakang sarjana ekonomi. " ……. Ya saya berasal dari latar belakang sarjana ekonomi dan mampu menguasai komputer……..".

Hasil penelitian didukung dari hasil penelitian terdahulu oleh (Tumija, Dkk 2023), Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi

Jawa Tengah, hasil penelitian dari segi sumber daya sudah terpenuhi dan tercukupi dengan baik.

Disposisi

Dalam penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Kecamatan Sumbang, koordinasi selalu diperhatikan dengan memperhatikan disposisi dari pimpinan, yang bertindak sebagai kuasa pengguna anggran di kantor. Setelah pagu anggran diitetapkan di kecamatan, kasubag perencanaan dan keuangan biasanya berkoorinasi dengan camat. Hasil riset menunjukan bahwa tidak ada kendala variabel disposisi di Pemerintah Kecamatan Sumbang,. Sistem tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam peraturan yang berlaku. Kasubag perencanaan dan keuangan menjalankan tugasnya setelah mendapatkan disposisi dari pimpinan, sehingga variabel ini tidak menjadi hambatan dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, tidak ada hambatan dalam pelksanaan tersebut, seperti yang terungkap dalam wawancara dengan kasubag perencanaan dan keuangan beserta operator. Kesimpulan ini diperkuat oleh pernyataan dari wawancara, “ saya selalu berkoordinasi dengan pimpinan, dan disposisi dari pimpinan selalu berjalan dengan baik”, yang sejalan dengan pengalaman yang diungkapkan oleh operator Sistem Informasi Keungan Daerah (SIPD). Temuan ini juga mendapat dukungan dari peneliti sebelumnya oleh (Laudy F, Najamudin, 2020), yang meneliti Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat, bahwa disposisi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat telah berjalan lancar antar pejabat dan staf.

Struktur Birokasi

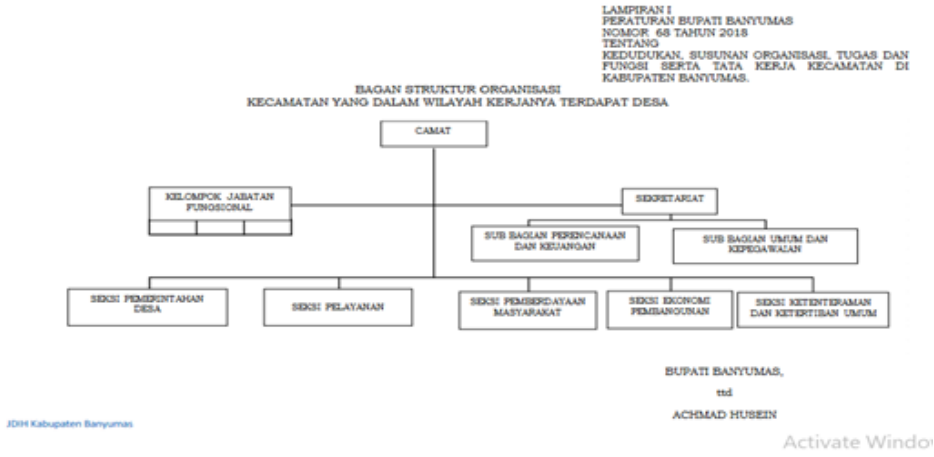
Dalam menjalankan tugas di sektor pemerintah daerah, harus patuh terhadap regulasi yang berlaku, termasuk peraturan bupati Nomor 68 tahun 2018 mengenai posisi, struktur organisai, tugas dan fungsi, serta prosedur kerja kecamatan di Kabupaten Banyumas, pasal 3 dari peraturan tersebut menyebutkan susunan organisasi di kecamatan yang tidak mencangkup kelurahan meliputi :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
3. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
4. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
5. Seksi Pemerintahan Desa;

6. Seksi Pelayanan;
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
8. Seksi Ekonomi Pembangunan;
9. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
10. Kelompok jabatan fungsional;

Dalam pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), harus mengikuti struktur organisasi yang telah ditetapkan serta mematuhi ketentuan yang dijelaskan secara rinci dalam Permendagri No 70 tahun 2019. Peraturan tersebut menjelaskan alur dan prosedur pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) secara sistematis. Hasil riset lapangan membenarkan bahwa dalam menjalankan pekerjaan berbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), semuanya sudah terarah dan sesuai dengan peraturan yang ada. Struktur organisasi memegang peran penting dalam pelaksanaan pekerjaan lapangan, dimana pejabat melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi yang telah diberikan pimpinan dan berdasarkan regulasi pemerintah.

Penginputan harus mengikuti alur yang telah ditetapkan, dimana camat sebagai pengguna anggaran dan pejaba PPTK yang ditunjuk oleh pimpinan, serta kasubag perencanaan dan keuangan , dibantu oleh bendahara pengeluaran dan operator penginputan data ke dalam sistem Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Struktur organisasi yang jelas dan terarah sangat penting dalam implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) karena berpengaruh besar. Keterkaitan yang erat antara struktur birokasi dan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) membuat kebijakan yang telah ditetapkan dan diterapkan tidak akan berjalan dengan baik jika struktur birokasi tidak jelas.



Gambar 3 Bagian struktur organisasi di Kecamatan

Sumber : Peraturan Bupati Nomor 68 tahun 2018, diolah

Pengkuran teori *edwar*d III berdasrakan struktur birokasi dan didukung penelitian dahulu dimana struktur birokasi sudah berjalan sesuai dengan aturan baik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam penelitian terdahulu yang ditelitio oleh (Tumija, Dkk, 2023), Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Semarang. Diperkuat oleh penelitian (Laudy F, Najamudin, 2020), Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat bahwa struktur birokasi sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.

Memilih merupakan bagian dari suatu upaya pemecahan sekaligus sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu dibutuhkan keputusan pembelian yang tepat (Kristiawati Indriana et.al. 2019 : 28)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisa dengan wawancara terkait Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Pemerintah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) telah di implementasikanpada Pemerintah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Implementasi ini ditunjukan oleh empat dimensi teori Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokasi.
2. Komunikasi, antara Camat, Kasubag Perencanaan dan Keuangan, dan operator yang menginput data aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berjalan dengan baik.
3. Sumber daya yang tersedia di Pemerintah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas cukup untuk digunakan dan penginputan dan pengoprasian, sumber daya mudah dilakukan, meskipun operator tidak ahli dalam akuntansi tetapi mereka mahir menggunakan komputer, sehingga tidak terjadi kendala dalam pengunaan di lapangan.
4. Pemerintah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas telah mematuhi peraturan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, sehingga semua disposisi yang dibuat pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Struktur pemerintahan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas telah sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018. Dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berjalan sesuai aturan dimana camat memberikan instruksi kepada Sekertaris Kecamatan, Kasubag Perencanaan dan Keuangan dengan bantuan operator. Prosedur dan struktur penginputan sudah sesuai prosedur dan struktur organisasi yang berlaku.
6. Hasil wawancara menunjukan bahwa beberapa masalah yang dihadapi termasuk masalah dengan trafik sistem Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) , jumlah waktu yang diberikan yang pendek dan ketidaksesuaian dengan Standar Satuan Harga (SSH) yang berlaku baik dari segi koefisiennya maupun satuan.
7. Adanya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Pemerintah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas membuat proses perencanaan keuangan daerah menjadi lebih mudah karena sistem elektronik memudahkan pengawasan dan audit oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP).
8. Penelitian ini seharusnya dilakukan di seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) bukan hanya dalam satu Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), sehingga fenomena pemanfaatan aplikasi dapat dilihat secara keseluruhan bukan hanya dalam satu sisi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) tetapi juga dalam satu Kabupaten. sehingga pemanfaatan aplikasi dapat dimaksimalkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

saya ingin mengucapkan terimakasih kepada ibu Dr. Poppy Dian Indira K, SE, M.Si, Ak,CA selaku dosen pembimbing, yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi kami selaku mahasiswa, sehingga dapat menulis artikel jurnal terkait implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, saya juga berterimakasih kepada seluruh pegawai Pemerintahan Kecamatan Sumbang karena telah meluangkan waktu untuk di wawancarai dalam penulisan implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

DAFTAR PUSTAKA

Alfani, D., & Nasution, J. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *6*(1), 4036–4043.

Andhayani, A. (2023). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah: e-Budgeting untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, *4*(2), 183–193. https://doi.org/10.33795/jraam.v4i2.005.

Arifin, J. F., & Pratolo, S. (2012). Pengaruh kualitas sistem informasi keuangan daerah terhadap kepuasan aparatur pemerintah daerah menggunakan model delone dan mclean. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, *13*(1), 28–34.

Aziz Sholeh, Abdul et. Al. 2024. Kompensasi Terhadap Motivasi Kerja Karyawan pada PT. Insolent Raya di Surabaya, Journal Of Management and Creative Business Vol. 2 No. 1 Januari 2024, Halaman : 82 - 96

Balqis, N., Fadhly, Z., & Az, M. (2021). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, *11*(1), 146–161. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i1.1953.

Bupati Banyumas. (2018). Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan , susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas.

Diani, D. I. (2014). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Pengalaman Kerja Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Di Kabupaten Jembrana). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1)*, *3*(1), 1–25.

Fahzura, L. (2020). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat. *Journal of Social and Policy Issue*. http://journal.pencerah.org/jspi.

Hendra, A. (2023). *Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah (Siagian , n . d .)*.

Ikriyati, T., & Aprila, N. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, *9*(2), 131–140. https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.131-140.

Iqbal, M. M., Handayani, S., & Safitri, D. I. (2022). Efektivitas Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, *3*(2), 173. https://doi.org/10.33474/jisop.v3i2.11192.

Islam, U., Agung, S., Ekonomi, F., & Studi, P. (2023). *Business Cases Report Magang MB-KM*.

Javadikasgari, H., Soltesz, E. G., & Gillinov, A. M. (2018). Surgery for Atrial Fibrillation. In *Atlas of Cardiac Surgical Techniques* (pp. 479–488). https://doi.org/10.1016/B978-0-323-46294-5.00028-5.

Javadikasgari, H., Soltesz, E. G., & Gillinov, A. M. (2018). Surgery for Atrial Fibrillation. In *Atlas of Cardiac Surgical Techniques* (pp. 479–488). https://doi.org/10.1016/B978-0-323-46294-5.00028-5.

Kadek, N., Puspita, N., Sasanti, E. E., & Kartikasari, N. (2023). *Pengaruh Pengelolaan Keuangan dan Pemahaman Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Terhadap Kualias Laporan Keuangan*. 191–202.

Kristiawati, et al. 2019. Citra Merek Persepsi Harga dan Nilai Pelanggan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mini Market Indomaret Lontar Surabaya. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen (JMM 17) Vol. 6 No. 2, September 2019, Hal. 27- 36.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. *Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia*, *Nomor 65*(879), 2004–2006.

Muflihah, M. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jambura Accounting Review*, *2*(1), 76–86. https://doi.org/10.37905/jar.v2i1.29.

Nasution, M. I., & M.Si, N. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *9*(2), 109. https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577.

Peran Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dalam Mewujudkan ‘ Satu Data Sidoarjo .’ (n.d.).

Riani, D., Putri, G. A. A., & Pratama, I. P. A. E. (2021). E-Readiness Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Menggunakan Metode Technology Acceptance Model (TAM) (Studi Kasus Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar). *JITTER - Jurnal Ilmiah Teknologi Dan Komputer*, *2*(3), 1–12.

Saputra, N. ketut sudianing dan agus. (2020). Staf Pengajar Universitas Panji Sakti 1. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, *12*(1), 60–69.